

**STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI
DI BERBAGAI SEKTOR**

Nazla Khairani Nasution
keynazla5106@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Menurut Transparency International (2023), skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih menunjukkan bahwa praktik korupsi belum sepenuhnya dapat ditekan secara signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan, khususnya yang berbasis penindakan hukum, belum cukup efektif jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan yang berbasis budaya. Korupsi tidak semata-mata terjadi karena lemahnya hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola pikir yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak situasi, perilaku tidak jujur justru dianggap hal biasa, bahkan kadang dianggap wajar selama sudah sering terjadi. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa korupsi bisa tumbuh karena adanya toleransi sosial terhadap tindakan yang sebenarnya salah. Oleh sebab itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu pendekatan yang lebih menyeluruh, terutama dengan membangun budaya anti korupsi sejak dini.

Budaya anti korupsi sendiri dapat dipahami sebagai kumpulan nilai yang mendorong seseorang untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, serta menolak segala bentuk penyimpangan. Nilai-nilai seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi dasar utama dalam budaya ini. Namun, pembentukannya tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari dunia pendidikan, lingkungan pemerintahan, masyarakat, hingga sektor usaha.

Di sisi lain, dampak korupsi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam jangka panjang. Praktik korupsi dapat menyebabkan pembagian sumber daya menjadi tidak adil, menurunkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta membatasi akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat memperparah kemiskinan dan menurunkan daya saing suatu negara.

Karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak sekadar berfokus pada penyelamatan keuangan negara, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini,

pembangunan budaya anti korupsi menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rumusan masalah dalam esai ini adalah: bagaimana strategi efektif dalam membangun budaya anti korupsi di berbagai sektor, dan bagaimana peran masing-masing sektor dalam mendukung upaya tersebut.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis strategi pembangunan budaya anti korupsi yang komprehensif serta mengidentifikasi peran penting dari setiap sektor dalam mewujudkan masyarakat yang berintegritas.

Argumen utama dalam esai ini adalah bahwa keberhasilan pembangunan budaya anti korupsi sangat bergantung pada sinergi antar sektor melalui pendekatan pendidikan, reformasi sistem, serta penguatan nilai sosial yang mendukung perilaku jujur dan bertanggung jawab.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Utama

Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi (World Bank, 2020). Dalam konteks hukum di Indonesia, korupsi mencakup berbagai tindakan seperti suap, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Budaya ini mencakup sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, serta keberanian untuk menolak dan melaporkan praktik korupsi. Pembentukan budaya ini tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada lingkungan sosial dan institusi tempat individu tersebut berada.

2.2 Teori Pendukung

Teori Institutional Theory menjelaskan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh norma dan aturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Jika organisasi memiliki budaya yang permisif terhadap korupsi, maka individu di dalamnya cenderung mengikuti pola tersebut. Sebaliknya, organisasi yang menjunjung tinggi integritas akan mendorong perilaku yang jujur. Selain itu, teori Behavioral Ethics menjelaskan bahwa perilaku etis seseorang tidak hanya ditentukan oleh nilai pribadi, tetapi juga oleh tekanan situasional dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku memerlukan perubahan sistem dan budaya secara bersamaan. Pendekatan berbasis integritas (integrity-based approach) juga menjadi konsep penting dalam upaya pencegahan korupsi modern. Pendekatan ini menekankan bahwa pengendalian korupsi tidak hanya dilakukan melalui aturan dan

sanksi, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran moral dan komitmen individu terhadap nilai-nilai etika. Dalam konteks ini, organisasi tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan (compliance), tetapi juga pada pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa individu yang bekerja dalam lingkungan yang berintegritas tinggi cenderung memiliki resistensi yang lebih kuat terhadap tekanan untuk melakukan tindakan koruptif.

Lebih lanjut, teori kontrol sosial (social control theory) juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mencegah korupsi. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keterikatan sosial, komitmen terhadap norma, serta keterlibatan dalam aktivitas positif. Ketika individu memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai sosial dan merasa menjadi bagian dari komunitas yang menjunjung tinggi integritas, maka kecenderungan untuk melakukan korupsi akan menurun. Oleh karena itu, pembangunan budaya anti korupsi tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada penguatan hubungan sosial dan norma kolektif dalam masyarakat.

Dalam literatur terbaru, pendekatan pencegahan korupsi juga banyak dikaitkan dengan konsep integritas publik (public integrity yang dikembangkan oleh OECD). Konsep ini menekankan bahwa sistem yang efektif dalam mencegah korupsi harus mampu menciptakan keseimbangan antara aturan formal, nilai etika, dan mekanisme pengawasan. Integritas publik tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tentang bagaimana individu dan organisasi secara aktif menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan budaya anti korupsi tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab institusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis.

Selain itu, teori rational choice juga relevan dalam menjelaskan perilaku korupsi. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung melakukan tindakan yang memberikan keuntungan terbesar dengan risiko terkecil. Dalam konteks korupsi, seseorang akan melakukan tindakan koruptif jika manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan dengan risiko hukuman. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi harus mampu meningkatkan risiko melalui pengawasan dan penegakan hukum, sekaligus menurunkan peluang melalui sistem yang transparan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada moralitas, tetapi juga pada perhitungan rasional individu.

2.3 Penelitian Relevan

Penelitian oleh Mungiu-Pippidi (2015) menunjukkan bahwa negara yang berhasil menekan korupsi adalah negara yang mampu membangun kontrol sosial yang kuat dan transparansi institusi yang tinggi. (World Bank, 2020). Studi Johnston (2014) menegaskan bahwa reformasi hukum tanpa perubahan budaya tidak akan memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Penelitian Prabowo (2014) di Indonesia juga menunjukkan bahwa faktor budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan perilaku koruptif, terutama dalam sektor publik. Selain itu, penelitian dari OECD (2020) menekankan pentingnya pendekatan berbasis integritas yang menggabungkan kebijakan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi secara sistemik.

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1 Strategi Pembangunan Budaya Anti Korupsi di Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor yang paling strategis dalam membangun budaya anti korupsi karena berperan dalam membentuk karakter individu sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang definisi dan jenis korupsi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai moral. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dapat dimasukkan dalam berbagai mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan diskusi etika terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode ceramah (Mungiu-Pippidi, 2015).

Selain itu, lingkungan pendidikan harus mencerminkan praktik yang bersih dan transparan. Misalnya, pengelolaan dana sekolah yang terbuka serta sistem evaluasi yang adil. Guru dan tenaga pendidik juga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai integritas. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian, kampanye sosial, dan advokasi anti korupsi. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan nilai anti korupsi dalam kehidupan nyata.

3.2 Strategi di Sektor Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam membangun budaya anti korupsi. Salah satu strategi yang efektif adalah penerapan sistem digital melalui

e-government. Digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan transparansi, mengurangi interaksi langsung, serta meminimalkan peluang terjadinya suap dan pungutan liar.

Selain itu, sistem pengawasan harus diperkuat, baik melalui lembaga internal maupun eksternal (Johnston, 2014). Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara juga perlu diperhatikan untuk mengurangi motivasi melakukan korupsi. Namun, hal ini harus diimbangi dengan sistem evaluasi kinerja yang ketat dan berbasis integritas.

Penting juga untuk mengembangkan strategi kolaboratif lintas sektor dalam membangun budaya anti korupsi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang memperkuat efektivitas program pencegahan korupsi (OECD, 2020). Misalnya, kerja sama dalam bentuk kampanye nasional, pelatihan integritas, serta pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara luas. Pendekatan kolaboratif ini juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar sektor, sehingga strategi yang diterapkan menjadi lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, penting untuk memperhatikan peran kepemimpinan dalam membangun budaya anti korupsi. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi dapat menjadi contoh nyata bagi anggota organisasi dan masyarakat. Kepemimpinan yang etis tidak hanya ditunjukkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan sehari-hari yang konsisten dengan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang dipimpin oleh individu berintegritas cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah (Prabowo, 2014). Oleh karena itu, penguatan nilai integritas pada level kepemimpinan menjadi strategi penting dalam membangun budaya anti korupsi secara berkelanjutan.

3.3 Strategi di Sektor Masyarakat dan Swasta

Masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas dalam sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Peningkatan literasi anti korupsi melalui kampanye publik, media sosial, dan pendidikan informal menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kejujuran juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam membangun budaya anti korupsi. Di sektor swasta, penerapan prinsip Good

Corporate Governance sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, kode etik yang jelas, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) (Transparency International, 2023). Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan sistem bisnis yang transparan juga menjadi faktor penting. Tanpa dukungan sektor swasta, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal.

Selain strategi yang telah dijelaskan, penting juga untuk memperhatikan pendekatan berbasis teknologi dalam mendukung pembangunan budaya anti korupsi. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel (World Bank, 2020). Misalnya, penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik dapat mengurangi praktik manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih mudah, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya anti korupsi.

Di samping itu, pendekatan berbasis nilai lokal dan budaya juga memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi (Mungiu-Pippidi, 2015). Setiap daerah memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun integritas, seperti nilai kejujuran, rasa malu, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari dibandingkan pendekatan yang bersifat formal dan normatif. Dengan mengintegrasikan nilai lokal dalam program anti korupsi, maka pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Selain itu, keberhasilan strategi pembangunan budaya anti korupsi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi kebijakan. Banyak program anti korupsi yang secara konsep sudah baik, namun belum memberikan hasil optimal karena kurangnya komitmen dalam pelaksanaan (Johnston, 2014). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara berkala serta penguatan koordinasi antar lembaga agar setiap kebijakan dapat berjalan secara efektif. Konsistensi ini menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa nilai-nilai anti korupsi benar-benar diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan budaya anti korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Setiap sektor memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem yang bersih dan berintegritas. Strategi utama meliputi pendidikan karakter di sektor pendidikan, reformasi birokrasi dan digitalisasi di sektor pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik di sektor swasta.

Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan budaya dan perilaku individu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya yang menolak korupsi secara konsisten. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berintegritas.

Perubahan pola interaksi masyarakat, terutama di era digital, menuntut adanya inovasi dalam strategi pencegahan korupsi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi, penguatan literasi digital, serta peningkatan kesadaran etika dalam penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam upaya membangun budaya anti korupsi ke depan. Dengan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan, diharapkan budaya integritas dapat terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan baru yang muncul dalam masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. <http://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Transparency International Indonesia. (2025). Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, demokrasi, dan krisis lingkungan. <http://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024>
- World Bank. (2020). The cost of corruption: A focus on Indonesia. World Bank Group.
- OECD. (2020). Public integrity: Building trust in government. OECD Publishing. <http://www.oecd.org/gov/ethics/public-integrity.htm>
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). The quest for good governance: How societies develop control of corruption. Cambridge University Press.
- Johnston, M. (2014). Corruption, contention and reform. Cambridge University Press.

- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1028–1062. <http://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>
- Maulidi, A., Girindratama, M. W., Soeherman, B., & Andono, F. A. (2025). Organizational culture, power distance and corruption: The mediating role of religiosity. *The Indonesian Accounting Review*, 14(2), 203–221. <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4795>
- Kemitraan. (2024). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023: Stagnan, peringkat turun. <https://www.kemitraan.or.id>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2026). Bangun budaya antikorupsi: Peran strategis perguruan tinggi. <https://permas.kpk.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah UU No. 20 Tahun 2001).